

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN TAGIME KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

Rivaldo Kogoya

NPP. 30.1501

Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: kogoyarivaldo@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Tagime is a sub-district located in Jayawijaya Regency. Jayawijaya Regency is one of 29 regencies/cities in Papua where the prevalence of stunting is still high. This needs to be taken more seriously by the government in order to accelerate the stunting rate reduction again. Therefore the Jayawijaya Regent issued Jayawijaya Regent Regulation Number 27 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Jayawijaya Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe how the Implementation of Stunting Handling Policies in Tagime District, Jayawijaya Regency, Papua Province, what are the supporting factors and inhibiting factors as well as efforts to overcome these obstacles. **Methods:** This study used a descriptive descriptive method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, interviews and interviews. This study uses the Policy Implementation Theory according to Edward III which contains 4 factors that influence the implementation of a public policy, to see the Implementation of Stunting Handling Policies in Tagime District which consists of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure factors. **Results/Findings:** Based on the results of this study, it can be concluded that the communication factors established by the government and the community have been going well, health resources and related facilities are still lacking, the disposition or understanding of this policy is good enough and the coordination or coordination structure that has been carried out has gone well. pretty good. In the analysis of the Implementation of the Stunting Management Policy in Tagime District, it was found that the supporting factors were cross-sectoral or cross-OPD collaboration that was going well, as well as the existence of a legal basis governing the implementation of stunting prevention policies and the inhibiting factor was that there were still many people who had not implemented clean living behaviors and healthy, and lack of knowledge from pregnant women. Efforts were made to overcome obstacles, namely conducting outreach to the community about clean and healthy lifestyle behaviors, also providing understanding and counseling to pregnant women as well as nutrition interventions in 1,000 HPK. **Conclusion:** The implementation of the Stunting Handling policy in Tagime District, Jayawijaya Regency, Papua Province has been going well but has not been implemented so optimally.

Keywords: Implementation, Handling, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Tagime merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya ialah salah satu dari 29 kabupaten/kota di Papua yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. Hal ini perlu ditanggapi lebih serius oleh pemerintah untuk kembali mempercepat penurunan angka stunting. Oleh karenanya Bupati Jayawijaya menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Jayawijaya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik, untuk melihat Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi yang di jalin oleh pemerintah bersama masyarakat sudah berjalan dengan baik, sumber daya kesehatan dan fasilitas terkait masih kurang, disposisi atau pemahaman tentang kebijakan ini sudah cukup baik dan struktur birokrasi atau koordinasi yang dilakukan telah berjalan dengan cukup baik. Pada analisis pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime ditemukan faktor pendukung yakni kerjasama antar Lintas Sektor atau Lintas OPD yang berjalan dengan baik, serta adanya landasan hukum yang mengatur pelaksanaan Kebijakan pencegahan stunting dan faktor penghambatnya ialah masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kurangnya pengetahuan dari Ibu Hamil. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat, juga memberi pemahaman dan penyuluhan kepada ibu hamil serta intervensi Gizi dalam 1.000 HPK. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan begitu optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Penanganan, Stunting

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua insan manusia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera baik secara lahiriah ataupun batiniah serta memiliki tempat untuk bertahan hidup serta mempunyai kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan bebas dari penyakit serta berhak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) ialah “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Proses tumbuh serta kembang seorang anak menentukan bagaimana kelangsungan hidup mereka dimasa mendatang. Tentunya, “orang dengan kesehatan yang prima memiliki daya pikir dan daya fisik yang baik untuk melakukan berbagai kegiatan setiap hari” (Agung, 2012). Ketersediaan sumber daya manusia yang unggul merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bersama, maka hal ini harus dipersiapkan sejak dini. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) memperlihatkan prevalensi pada balita stunting di tahun 2018 terdapat 30,8 persen

yang mana berarti satu dari tiga balita mengalami stunting. Negara Indonesia adalah negara ke-2 tertinggi pada Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia yang mempunyai beban anak stunting. Stunting (anak kerdil) merupakan suatu kondisi dimana anak balita (bayi di bawah lima tahun) mengalami gagal tumbuh dikarenakan kurangnya gizi kronis sehingga seorang anak terlihat terlalu pendek untuk usianya kecukupan gizi pada bayi sangat penting sejak bayi di dalam kandungan, maupun pada masa awal setelah bayi itu lahir. Pada masa ini, biasanya kondisi stunting belum terlihat. Kondisi stunting akan terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) merupakan balita yang memiliki panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*). Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) arti stunting sendiri adalah anak balita yang nilai *z-score*nya tidak sampai -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan tidak mencapai -3SD (*severely stunted*) 1.

Mengacu dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (2018-2019) dapat dilihat bahwa Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu daerah dari 29 kabupaten-kota di Provinsi Papua dimana masih memiliki jumlah prevalensi stunting yang dapat dibilang cukup tinggi yakni mencapai 31,6% pada tahun 2018. Sedangkan di Kecamatan Tagime sendiri prevalensi stuntingnya dapat dilihat dari tabel seperti berikut.

Tabel 1.
Prevalensi Stunting Menurut Desa Di Kecamatan Tagime 2022

Desa	Jumlah Balita (Anak)	Stunting		Prevalensi (%)
		Pendek (Anak)	Sangat Pendek (Anak)	
LAKWAME	57	1	4	8.8
TAGIME	67	7	5	17.9
POROME	39	0	0	0.0
ONGGOBALO	19	0	2	10.5
LAPEYO	0	0	0	0.0
YORDANIA TULAK	0	0	0	0.0
WANDINGGUNIE	0	0	0	0.0
GUME KUPARI	0	0	0	0.0
MULUGAME	0	0	0	0.0
YOGOBUR	0	0	0	0.0
YONGGAPURA	0	0	0	0.0
TAGIME	182	8	11	0.1

Sumber: Ditjen Bina Pemda Kementerian Dalam Negeri 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, prevalensi stunting di Kecamatan Tagime sendiri pada tahun 2022 ialah 0.1%, dengan jumlah balita yakni 182 anak, seperti yang telah disajikan pada Tabel 1.2. Dimana dapat dikatakan bahwa 1 dari 18 anak yang ada di Kecamatan Tagime mengalami stunting.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada 3 (tiga) permasalahan utama dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yakni 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perilaku pola hidup bersih dan sehat. 2) Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai pada tingkat kecamatan. 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi terutama pada ibu hamil dan balita..

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks implementasi kebijakan. Penelitian pertama dilakukan oleh Sri Hajjah Purba, (2019) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggang Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penurunan stunting terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan daerah Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih terdapat sebagian dari masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting. Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Wididiati, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggulungannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik, baik dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan. Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Qotrun Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Penelitian sebelumnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitian yang dilakukan yakni di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Bila diperhatikan dari tujuan penelitian dalam penelitian sebelumnya maka didapatkan tidak ada kesamaan tujuan penelitian yang dilakukan. Selain itu, jika ditinjau dari metode penelitian, terdapat 1 (satu) penelitian sebelumnya yang berbedadengan metode yang peneliti lakukan, diantaranya metode penelitian kombinasi (mixed method research) (Sri Hajijah Purba, 2019).

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi, faktor pendukung dan penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu kejadian, keadaan sosial ataupun fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan data kualitatif (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini penulis dalam melakukan penelitian menggunakan data yang berasal dari data primer serta data sekunder yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian yang jelas. .

Dalam penelitian ini, penulis menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Berikut Informan berdasarkan teknik Purposive Sampling dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas Bolakme, Staf Gizi Dinas Kesehatan, serta Orang Tua Anak Penderita Stunting di Kecamatan Tagime sebagai informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (1984) dengan tahapan diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori George Edward III untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting DI Kecamatan Tagime. Dalam teori George Edward III (Agustino, 2017) ini dikemukakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan data-data serta teori yang penulis sajikan selama proses penelitian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

3.1.1 Komunikasi

A. Transmisi

Transmisi diartikan sebagai penyaluran informasi dari pembuat kebijakan kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran. Transmisi terkait dengan Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya adalah salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada setiap kepala-kepala puskesmas yang ada di lingkup Kabupaten Jayawijaya untuk selanjutnya melalui petugas gizi puskesmas disampaikan kepada setiap masyarakat yang ada di tiap-tiap wilayah kerja puskesmas.

B. Kejelasan

Penyampaian Informasi atau perintah yang diterima oleh sasaran program harus benar-benar jelas dan tidak membuat bingung. Indikator kejelasan pada Implementasi program penanganan stunting telah sesuai dengan teori Implementasi menurut Edward III yang menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan harus memiliki kejelasan dan tidak membingungkan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Pada program percepatan pencegahan stunting ini pembahasannya sudah baik karena pelaksanaannya sudah mempunyai pedoman seperti petunjuk teknis pelaksanaan dan sudah ada pedoman hukum yang mengatur pelaksanaan program penanganan stunting ini

3.1.2 Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia (Staf)

Sumber daya manusia menjadi faktor apakah kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Berkaitan dengan hal ini, pelayanan yang bermutu dan memuaskan tentunya menjadi dambaan setiap warga masyarakat sebagai penikmat layanan kesehatan. Kesigapan dan pelayanan yang dianggap sudah baik dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi khususnya untuk program penanganan stunting ini. Namun hal tersebut tidak akan selalu efektif jika adanya kekurangan staf yang secara langsung paham mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan. Perlu adanya penambahan jumlah staf yang berkompentensi agar implementasi dapat terlaksana dengan baik.

B. Sumber daya Wewenang

Sumber daya penunjang untuk menguatkan penyelenggaraan kebijakan dibutuhkan dasar kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini bupati Kabupaten Jayawijaya kepada Dinas Kesehatan sebagai pelaksana langsung diberikan sepenuhnya dan bersifat formal. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilaksanakan di lapangan dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan sudah cukup bagus mulai dari bawah sampai pada jenjang pimpinan tertinggi serta penghargaan terhadap hierarki masih ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

C. Sumber Daya Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang penting berikutnya dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam hal ini adalah pemahaman dan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan

dan bagaimana mereka harus melakukan kebijakan yang ditetapkan. Di Kabupaten Jayawijaya sendiri, melalui Dinas Kesehatan para staf serta petugas gizi yang menangani program penanganan Stunting di puskesmas-puskesmas sudah pernah diberi pelatihan seperti BIMTEK (Bimbingan Teknis) dan pelatihan yang diadakan di Provinsi . Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa Sebagian masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas yang mengurus terkait penanggulangan Stunting yang ada pada wilayah kerja Puskesmas induk Bolakme Kecamatan Tagime

D. .Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang menunjang dan penting dalam implementasi. Walaupun pelaksana kebijakan sudah mempunyai staf yang memadai, sudah memahami apa yang harus dilakukan dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya namun tidak didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai maka implementasi yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan efektif bahkan tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa fasilitas yang ada dalam pelaksanaan penanganan stunting di Kecamatan Tagime masih kurang dalam halnya moda transportasi sehingga diharapkan adanya peningkatan fasilitas seperti ambulans dari pihak pemerintah agar pelaksanaan penanggulangan Stunting dan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

3.1.3 Struktur Birokrasi

A. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan kinerja suatu organisasi akan selalu terukur dengan indikator dan pencapaian target yang telah ditentukan, karena dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tidak langsung berisi petunjuk teknik yang berisi standar kuantitas dan kualitas suatu instrumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan sudah melaksanakan program ini sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

B. Fragmentasi

Fragmentasi dilakukan untuk memudahkan dalam hal pengimplementasian kebijakan. Hal ini karena kebijakan tidak dapat hanya diselenggarakan oleh satu individu saja, maka dari itu dilakukan fragmentasi atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan maka didapatkan bahwa dari pemerintah sudah memaksimalkan pelayanan demi tercapainya tujuan dari penanggulangan Stunting ini, namun pada pelaksanaannya masih ada banyak hambatan seperti kekurangan staf, kekurangan sarana dan prasara, dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi agar pelayanan lebih baik dan bisa mencapai setiap target yang ditentukan.

3.1.4 Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dapat terimplementasikan bila ada dukungan oleh birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Disposisi berkaitan dengan watak dan karakter aparatur. Penunjukkan petugas pelaksana dipilih berdasarkan

aturan serta regulasi yang berlaku seperti kemampuan dan skill serta latar belakang Pendidikan. Seluruh pelaksana program tentunya sudah memenuhi syarat, tidak hanya itu semuanya harus memiliki pengalaman yang lebih sehingga mereka dipercaya untuk melaksanakan tugas.

B. Insentif

Insentif adalah keuntungan atau biaya tertentu yang dapat menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana melaksanakan kebijakan dengan baik. Pemberian insentif dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dan sikap pelaksana kebijakan.. Program Penanganan Stunting ini bukan hanya berfokus pada penurunan angka Stunting, tetapi juga difokuskan pada Kerjasama antar lintas sektor dan lintas OPD yang berjalan dengan baik dalam hal ini Bappeda sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayawijaya. Melalui insentif ini diharapkan keempat OPD ini mampu bekerja sama dengan baik dan mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing sehingga pelaksanaan Penanganan Stunting dapat berjalan dengan baik.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, makadiketahui faktor yang menjadi pendukung Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime yakni; 1) Kerjasama antar Lintas Sektor atau Lintas OPD yang Berjalan Dengan Baik., 2) Adanya Landasan Hukum yang Mengatur Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting. Sedangkan untuk Faktor Penghambatnya seperti; 1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 2) Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, 3) Kurangnya pengetahuan dari Ibu Hamil

3.3 Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni; 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat, 2) Memberi pemahaman dan penyuluhan kepada ibu hamil serta intervensi Gizi dalam 1.000 HPK

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara sarana dan prasarana fasilitas yang ada dalam pelaksanaan penanganan stunting di Kecamatan Tagime masih kurang dalam halnya moda transportasi sehingga diharapkan adanya peningkatan fasilitas seperti diadakannya mobil ambulans dari pihak pemerintah agar pelaksanaan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ditemukan juga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya pengetahuan dari ibu hamil yang menyebabkan tidak terpenuhinya gizi yang cukup kepada kandungan saat masa kehamilan.

Selain dari itu pelayanan yang bermutu dan memuaskan tentunya menjadi dambaan setiap warga masyarakat sebagai penikmat layanan kesehatan. Kesigapan dan pelayanan yang dianggap sudah baik dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi khususnya untuk program penanganan stunting ini. Namun hal tersebut tidak akan selalu efektif jika adanya kekurangan staf yang secara langsung paham mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan. Perlu adanya penambahan jumlah staf yang

berkompetensi agar implementasi dapat terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan begitu optimal. Dapat dilihat dari belum terdapat fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas dan transportasi penunjang di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan juga kurangnya penyuluhan mengenai masalah Kesehatan Gizi (Stunting) dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tagime Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dosen pembimbing saya, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- A.M. Huberman & M.B Miles. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Universitas Indonesia
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara Setya Saputra, Suryoto Suryoto, Chamid Sutikno, 2022. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga*. Jurnal. Purwokerto: Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
- Ari Agung, I Gusti Ayu. (2012). *Pengaruh Perbaikan Gizi Kesehatan Terhadap Produktivitas Kerja*. Fakultas MIPA Universitas Hindu Indonesia. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/2973/2131> diakses pada september 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. <https://jayawijayakab.bps.go.id/> diakses pada januari 2023.
- Badan Pusat Statistik Nasional (2018). Prevalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018. <https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjekViewTab5> diakses pada september 2022.
- Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti 2021. *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung*. Jurnal. Bandung: Universitas Padjajaran
- Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (2022). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi*. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/4> diakses pada september 2022
- Kemntrian Kesehatan RI. (2018). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan edisi Stunting*., 2. <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting->

2018.pdf diakses pada oktober 2022.

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Jayawijaya

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Purba, Sri Hajija, 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Skripsi. MEDAN: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.

Putri Wididiati, Herbasuki Nurcahyanto, AUFARUL MAROM, 2022. *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)*. Jurnal. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Qotrun Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan, 2022. *Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang*. Jurnal. Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang.

Sugiyono, 2013. *Metode Peneliitain Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

